

Dewi Indrayani Hamin
Fahrudin Zain Olilingo
Herlina Rasjid
Srie Isnawaty Pakaya

INTEGRASI SUMBER DAYA ALAM *dan* FINANSIAL

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



INTEGRASI
SUMBER
DAYA ALAM
dan
FINANSIAL

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

INTEGRASI SUMBER DAYA ALAM *dan* FINANSIAL

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Dewi Indrayani Hamin
Fahrudin Zain Olilingo
Herlina Rasjid
Srie Isnawaty Pakaya

 Penerbit
litrus.

INTEGRASI SUMBER DAYA ALAM DAN FINANSIAL DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis: Dewi Indrayani Hamin
Fahrudin Zain Olilingo
Herlina Rasjid
Srie Isnawaty Pakaya

ISBN: 978-623-127-396-3

Copyright ©Mei 2025
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 154

Desainer Sampul: Nihlatul Azizah
Penata Isi: Nihlatul Azizah

Cetakan I: Mei 2025

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Blok B11. Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



PRAKATA

Sumber daya alam (SDA) memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan manusia. Sebagai elemen utama kehidupan, SDA perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemahaman mengenai SDA mencakup berbagai jenis dan potensi yang dimilikinya, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, prinsip dasar manajemen SDA—seperti konservasi, pemanfaatan secara bijak, dan pelestarian—merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam.

Peran ekonomi hijau dalam manajemen SDA sangat krusial. Ekonomi hijau menawarkan pendekatan ramah lingkungan dalam pemanfaatan SDA, dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan ekonomi. Di Indonesia, pengembangan ekonomi hijau didorong oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi antara SDA dan finansial menjadi sangat penting. Pembiayaan yang tepat dapat mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan mempercepat pembangunan kawasan.

Strategi manajemen SDA yang efektif mencakup pengelolaan berbasis ekosistem, konservasi, dan pemanfaatan berkelanjutan. Regulasi serta kebijakan terkait SDA juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan SDA tidak hanya mengutamakan hasil jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan dan kelestariannya. Teknologi dan inovasi memainkan

peran signifikan dalam mengoptimalkan pengelolaan SDA. Penggunaan teknologi efisiensi SDA, big data, serta inovasi digital seperti Internet of Things (IoT) dapat meningkatkan pemantauan dan pengelolaan SDA secara lebih efektif dan efisien.

Namun, pengelolaan SDA dan finansial menghadapi tantangan global yang kompleks. Dampak perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik pengelolaan SDA menjadi isu yang harus dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk menciptakan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Pendekatan seperti Public-Private Partnership (PPP) dan peran aktif komunitas menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan ini.

Dengan pemahaman dan integrasi konsep dasar SDA, ekonomi hijau, strategi manajemen yang tepat, teknologi, serta kolaborasi multi-pihak, diharapkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dapat tercapai dan kawasan yang ramah lingkungan dapat terwujud, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

PENTINGNYA SUMBER DAYA ALAM DAN PERAN MANAJEMEN FINANSIAL UNTUK KEBERLANJUTAN	1
Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Konteks Kawasan	1
Peran Manajemen Finansial dalam Mendukung Keberlanjutan	5

BAB II

KONSEP DASAR SUMBER DAYA ALAM.....	7
Definisi Sumber Daya Alam.....	7
Jenis Sumber Daya Alam	10
Peran Sumber Daya Alam dalam Pembangunan	12
Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Alam.....	16
Konsep Keberlanjutan dalam Pembangunan Kawasan	18
Hubungan antara Sumber Daya Alam dan Finansial	21
Inovasi dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam.....	25

BAB III

PERAN EKONOMI HIJAU PADA MANAJEMEN

SUMBER DAYA ALAM	29
Definisi dan Teori Ekonomi Hijau	29
Prinsip-Prinsip Ekonomi Hijau	31
Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Hijau di Indonesia.....	35
Investasi Berkelanjutan dan Keuangan Hijau	36
Dasar Teori Pendukung Ekonomi Hijau.....	40
Inovasi dalam Ekonomi Hijau	42
Peran Ekonomi Hijau dalam Pengelolaan SDA.....	44

BAB IV

STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM.....

Pengelolaan Berbasis Ekosistem	50
Regulasi dan Kebijakan SDA di Indonesia	52
Studi Kasus: Manajemen Hutan, Laut, dan Tambang.....	55

BAB V

INTEGRASI SDA DAN FINANSIAL UNTUK

PEMBANGUNAN KAWASAN	59
Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis SDA	59
Kebijakan Fiskal dan Insentif Ekonomi.....	66
Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Investasi	72

BAB VI

PENGELOLAAN KAWASAN BERBASIS SUMBER

DAYA ALAM	75
Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Sumber Daya Alam	75
Zonasi dan Tata Ruang untuk Pemanfaatan Sumber Daya Alam	77

Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Kawasan... 80	
Kawasan Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata	82

BAB VII

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN

SDA DAN KAWASAN	87
Peran Teknologi dalam Efisiensi SDA.....	87
Inovasi Digital dalam Pengelolaan SDA dan Finansial.....	89
Big Data dan IoT untuk Monitoring SDA	92
Transformasi Digital untuk Kawasan Berkelanjutan	93

BAB VIII

TANTANGAN GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SDA

DAN FINANSIAL.....	97
Dampak Perubahan Iklim terhadap SDA dan	
Ekonomi Kawasan	97
Ketimpangan Ekonomi dan Akses Sumber Daya	99
Konflik Pengelolaan SDA di Tingkat Lokal dan Global	102
Regulasi Global dan Implikasinya bagi Kawasan	105

BAB IX

STUDI KASUS DAN PRAKTIK TERBAIK	109
Pengelolaan Sumber Daya Tambang dan Manajemen Finansial...109	
Energi Baru Terbarukan di Kawasan Pedesaan	118
Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas.....	122
Praktik Internasional: Contoh dari Negara Maju dan	
Berkembang.....	126

BAB X

KOLABORASI MULTI-PIHAK UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN BERKELANJUTAN.....	131
Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat.....	131
Public Private Partnership (PPP) dalam Pengelolaan SDA	135
Pendekatan Komunitas untuk Pengelolaan SDA	137
Contoh Implementasi Kolaborasi di Indonesia	140

BAB XI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	145
Rangkuman Temuan Utama	145
Rekomendasi untuk Pemerintah, Swasta, dan Akademisi	146
Peta Jalan Menuju Pembangunan Kawasan Berbasis SDA	147
Arah Masa Depan Pengelolaan SDA dan Kawasan.....	148
 Daftar Pustaka.....	 151



BAB I

PENTINGNYA SUMBER DAYA ALAM DAN PERAN MANAJEMEN FINANSIAL UNTUK KEBERLANJUTAN

Pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Konteks Kawasan

Paradigma pembangunan ekonomi dalam beberapa decade terakhir mengalami pergeseran signifikan dari eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali menuju pendekatan berbasis keberlanjutan. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran global akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan SDA yang melimpah, menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang tanpa mengorbankan ekosistem.

Ekonomi hijau dan manajemen sumber daya alam telah menjadi isu sentral dalam kebijakan pembangunan. Konsep ekonomi hijau mengacu

pada sistem ekonomi yang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mengembangkan sektor-sektor berbasis energi terbarukan. Di sisi lain, manajemen SDA yang efektif bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam guna mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekologis. Integrasi antara ekonomi hijau dan manajemen SDA menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan.

Manajemen finansial merupakan aspek krusial dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Investasi dalam sektor hijau memerlukan strategi pembiayaan yang tepat agar dapat memberikan dampak yang maksimal. Dalam konteks ini, berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau (*green bonds*), pajak karbon, serta mekanisme perdagangan emisi telah diterapkan di berbagai negara untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Di Indonesia, peran sektor perbankan dan pasar modal dalam mendukung ekonomi hijau semakin meningkat. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang mendorong sektor keuangan untuk mengalokasikan dana ke proyek-proyek berbasis lingkungan. Selain itu, skema blended finance, yang menggabungkan dana publik dan swasta, menjadi solusi dalam mendanai proyek energi terbarukan dan konservasi lingkungan.



BAB II

KONSEP DASAR SUMBER DAYA ALAM

Definisi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan seluruh potensi yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses produksi serta memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam diartikan sebagai potensi alam yang dapat dikembangkan dalam proses produksi.

Sumber Daya Alam (SDA) merupakan seluruh elemen yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. SDA mencakup unsur-unsur seperti tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, serta berbagai material alam lainnya yang memiliki potensi guna. Namun, eksistensi suatu unsur alam tidak otomatis menjadikannya sebagai sumber daya.

Menurut Zimmerman (1951), suatu entitas baru dapat disebut sebagai sumber daya apabila manusia mampu mengenali nilai dan potensi kegunaannya serta mengintegrasikannya dalam aktivitas kehidupan atau

proses produksi. Dengan demikian, keberadaan sumber daya alam bersifat relatif terhadap tingkat pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan manusia itu sendiri.

Pandangan ini diperluas oleh Barbier (2019) yang menyatakan bahwa sumber daya alam tidak hanya mencakup manfaat langsung yang dapat dieksploitasi, tetapi juga nilai-nilai ekosistem yang bersifat tidak langsung.

Contohnya adalah fungsi regulasi iklim, penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, serta penyediaan jasa ekosistem seperti penyerbukan, penyaringan air, dan stabilisasi tanah. Dalam perspektif ini, sumber daya alam tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai input dalam sistem produksi, tetapi juga mengandung nilai ekologis yang esensial dalam menjaga keberlanjutan sistem kehidupan.

Selain dimensi ekonomi dan ekologi, sumber daya alam juga memiliki dimensi sosial yang tak kalah penting. Akses terhadap SDA, pengelolaannya, serta distribusi manfaatnya sangat memengaruhi kehidupan sosial, terutama di komunitas yang bergantung langsung pada alam seperti masyarakat adat dan agraris.

Bagi mereka, SDA bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari identitas budaya dan struktur sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara holistik, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek ekonomi, ekologi, dan sosial agar terwujud tata kelola SDA yang adil dan berkelanjutan.

Secara umum, sumber daya alam mencakup semua unsur lingkungan hidup, baik yang bersifat biotik seperti tumbuhan dan hewan, maupun abiotik seperti air, udara, dan mineral, yang memiliki nilai guna bagi kelangsungan hidup manusia (Syamsiati, 2019).

Keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan dan mendorong pembangunan nasional. Menurut Iswandi dan Dewata (2020), ruang lingkup sumber daya alam menjadi dasar dalam penyediaan energi, air, dan pangan, serta menopang sistem kehidupan secara keseluruhan.



BAB III

PERAN EKONOMI HIJAU PADA MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM

Definisi dan Teori Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko dan kerusakan lingkungan. Menurut United Nations Environment Programme (UNEP, 2011), ekonomi hijau diartikan sebagai “ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan lapangan kerja melalui investasi yang mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.”

Secara konseptual, ekonomi hijau menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan, efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan penguatan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini mendorong investasi dalam energi terbarukan, penerapan efisiensi energi, pengelolaan limbah berkelanjutan, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam paradigma ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi peningkatan angka

produksi, tetapi juga diukur berdasarkan dampaknya terhadap ekosistem dan keadilan sosial.

Berbagai ahli telah mengembangkan teori untuk memperkaya pemahaman mengenai konsep ekonomi hijau. Berikut beberapa pemikiran penting dari para pakar:

1. Pearce, markandya, dan barbier (1989)
Dalam karya mereka *Blueprint for a Green Economy*, ketiga pakar ini menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Mereka menekankan pentingnya valuasi ekonomi atas jasa ekosistem dan perlunya internalisasi biaya lingkungan ke dalam perhitungan ekonomi nasional, sehingga aktivitas ekonomi lebih mencerminkan nilai ekologis yang sesungguhnya.
2. Herman Daly (1996)
Dalam bukunya *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*, Daly memperkenalkan konsep *steady-state economy*, yakni sistem ekonomi yang mempertahankan keseimbangan antara konsumsi sumber daya dengan kapasitas regenerasi alam. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali akan mengakibatkan degradasi lingkungan yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.
3. Michael Jacobs (1991)
Melalui *The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future*, Jacobs menekankan perlunya perubahan kebijakan ekonomi secara menyeluruh untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Ia mengusulkan penerapan insentif pajak bagi industri ramah lingkungan, regulasi ketat terhadap pencemaran, serta investasi besar dalam infrastruktur hijau sebagai langkah strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
4. Nicholas Stern (2006)
Dalam *The Stern Review on the Economics of Climate Change*, Stern menyoroti bahwa biaya untuk melakukan mitigasi perubahan iklim



BAB IV

STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM

Sumber daya alam (SDA) memegang peran sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, eksploitasi SDA yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta berkurangnya manfaat ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang tepat untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial secara berkelanjutan.

Bab ini membahas berbagai pendekatan dalam manajemen sumber daya alam, meliputi pendekatan berbasis ekosistem, konsep konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, serta regulasi yang diterapkan di Indonesia. Selain itu, akan diuraikan pula studi kasus terkait pengelolaan hutan, laut, dan sektor pertambangan, guna memberikan gambaran aplikatif mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya alam di berbagai sektor.

Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan Berbasis Ekosistem

Pendekatan Pengelolaan Berbasis Ekosistem (Ecosystem-Based Management, EBM) merupakan strategi manajemen sumber daya alam yang mempertimbangkan keseluruhan ekosistem, termasuk interaksi antara manusia dan lingkungan alami. Berbeda dengan pendekatan sektoral tradisional yang sering fokus pada satu jenis sumber daya, EBM mengintegrasikan berbagai komponen ekosistem dalam satu kesatuan yang saling bergantung. Tujuan utama pendekatan ini adalah menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dinikmati baik oleh generasi saat ini maupun yang akan datang.

1. Prinsip pengelolaan berbasis ekosistem

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP), pendekatan EBM didasarkan pada sejumlah prinsip utama berikut:

a. Keseimbangan ekologi dan sosial

Pengelolaan berbasis ekosistem berupaya mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem, sekaligus memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Perlindungan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup manusia dipandang sebagai dua tujuan yang saling terkait.

b. Pendekatan multisektoral

EBM melibatkan berbagai sektor, seperti kehutanan, pertanian, kelautan, dan pertambangan, dalam satu kerangka pengelolaan terpadu. Pendekatan ini mendorong koordinasi lintas sektor untuk menghindari kebijakan yang saling bertentangan dan memastikan keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh.

c. Fleksibilitas dan adaptasi

Karena ekosistem bersifat dinamis dan terus berubah akibat faktor alam maupun tekanan manusia, strategi pengelolaan harus bersifat adaptif. Kebijakan perlu dirancang fleksibel agar dapat



BAB V

INTEGRASI SDA DAN FINANSIAL UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN

Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis SDA

Pembangunan kawasan yang berkelanjutan memerlukan strategi integratif yang menyatukan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan sistem finansial yang mendukung. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan daya saing ekonomi suatu wilayah tanpa mengabaikan aspek ekologi dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

Sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang diperkenalkan dalam Laporan Brundtland (1987), kesejahteraan ekonomi hanya dapat dicapai apabila keseimbangan lingkungan dan pemerataan sosial turut menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pengelolaan SDA yang tepat tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Barbier (2019), dalam publikasinya di *Ecological Economics*, menekankan bahwa investasi dalam pengelolaan SDA berbasis teknologi mampu meningkatkan produktivitas tanpa memperburuk kondisi lingkungan.

Hal ini diperkuat oleh temuan Bank Dunia (2020), yang menyatakan bahwa negara-negara yang mengintegrasikan strategi keuangan dengan kebijakan pengelolaan SDA cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara yang masih bergantung pada eksploitasi SDA secara konvensional.

Di Indonesia, model pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi salah satu instrumen kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan potensi SDA sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. KEK berbasis SDA dirancang untuk menarik investasi serta memperkuat industri lokal melalui pengelolaan sumber daya yang berwawasan lingkungan.

Provinsi Gorontalo, misalnya, memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan ini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo (2024) mencatat bahwa sektor pertanian tumbuh sebesar 4,23% pada tahun 2023 dan tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Namun, pembangunan kawasan berbasis SDA tidak lepas dari tantangan, terutama dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya dilakukan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dan pemberian insentif ekonomi berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung transformasi industri berbasis SDA.

Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai contoh, telah mengalokasikan belanja modal sebesar Rp218,8 miliar pada tahun 2023 untuk mendukung pengembangan infrastruktur industri dan teknologi. Investasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri daerah, sekaligus meningkatkan daya saing Gorontalo di tingkat nasional dan global.

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemanfaatan SDA adalah penerapan teknologi dan inovasi. Penggunaan teknologi modern tidak hanya memungkinkan proses



BAB VI

PENGELOLAAN KAWASAN BERBASIS SUMBER DAYA ALAM

Kawasan Ekonomi Khusus Berbasis Sumber Daya Alam

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu strategi pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan SDA secara optimal dan berkelanjutan.

Konsep KEK ini dirancang sebagai suatu wilayah tertentu dengan peraturan dan fasilitas khusus yang disediakan oleh pemerintah untuk menarik investor, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja di daerah. KEK memfasilitasi kegiatan ekonomi yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing tinggi, khususnya di sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi SDA lokal.

Strategi ini tidak hanya mengusung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan antardaerah, terutama wilayah yang selama ini belum berkembang secara maksimal.

Secara global, KEK telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan kawasan industri. Banyak negara menerapkan konsep ini untuk memperkuat fondasi industri nasional, meningkatkan nilai tambah hasil SDA, serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di luar wilayah metropolitan.

Di Indonesia, KEK mendapat perhatian khusus karena negara ini memiliki kekayaan SDA yang sangat besar dan beragam, mencakup pertambangan, kehutanan, perikanan, pertanian, serta energi baru dan terbarukan. Pengelolaan SDA dalam kerangka KEK juga diharapkan mampu menghindari praktik eksploitasi liar dan mendorong investasi yang lebih bertanggung jawab serta ramah lingkungan.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2023), hingga saat ini telah dikembangkan 19 KEK di berbagai wilayah Indonesia dengan nilai investasi yang telah melampaui Rp200 triliun. KEK-K tersebut diarahkan pada sektor-sektor strategis yang potensial untuk dikembangkan melalui investasi langsung.

Misalnya, KEK Mandalika difokuskan pada pengembangan pariwisata yang berbasis lingkungan, memanfaatkan keindahan alam setempat tanpa merusak ekosistem. Sementara itu, KEK Sei Mangkei merupakan contoh kawasan industri berbasis kelapa sawit yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek produksi, rantai pasok, maupun pengelolaan limbah. Model seperti ini memperlihatkan bahwa pengembangan KEK tidak harus berbasis eksploitasi semata, melainkan dapat mengedepankan prinsip *green economy*.

Namun demikian, keberhasilan pengembangan KEK tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan harmonis antarlevel pemerintahan. Banyak aturan sektoral yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat investasi.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan infrastruktur antara KEK dan wilayah pendukungnya, yang mengganggu efisiensi logistik dan keterhubungan pasar. Tantangan lainnya adalah potensi kerusakan lingkungan



BAB VII

TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM PENGELOLAAN SDA DAN KAWASAN

Peran Teknologi dalam Efisiensi SDA

Pemanfaatan teknologi telah menjadi pilar penting dalam transformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) menuju arah yang lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan manusia akan energi, pangan, dan bahan baku industri, teknologi hadir sebagai solusi untuk mengurangi tekanan terhadap ekosistem serta memastikan bahwa eksploitasi SDA tetap berada dalam batas daya dukung lingkungan.

Inovasi teknologi tidak hanya memungkinkan peningkatan hasil produksi, tetapi juga mengurangi limbah, mengefisienkan distribusi, dan memperbaiki akuntabilitas dalam seluruh rantai pasok sumber daya.

Menurut laporan United Nations Environment Programme (UNEP, 2022), penerapan teknologi canggih dalam pengelolaan SDA dapat menurunkan volume limbah hingga 40% dan meningkatkan efisiensi produksi sebesar 30%. Angka ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar

pelengkap, melainkan elemen strategis dalam manajemen SDA yang modern.

Dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, hingga energi, teknologi terbukti dapat mengubah cara manusia mengakses, mengelola, dan melestarikan kekayaan alam secara signifikan.

Salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan adalah *Internet of Things* (IoT). Dalam sektor pertanian, teknologi ini diterapkan melalui sistem irigasi cerdas yang dilengkapi sensor untuk memantau kelembapan tanah, suhu, serta kondisi cuaca secara *real-time*.

Data yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengatur penyiraman secara otomatis hanya saat diperlukan, sehingga mencegah pemborosan air dan memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO, 2021) melaporkan bahwa sistem ini mampu menghemat penggunaan air hingga 50%, sekaligus mengurangi beban kerja petani dan meningkatkan produktivitas lahan.

Di sektor energi, teknologi *smart grid* memberikan solusi untuk distribusi listrik yang lebih efisien dan adaptif. *Smart grid* memungkinkan integrasi antara pembangkit listrik dari energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, dengan sistem distribusi yang mampu merespons secara *real-time* terhadap perubahan permintaan energi.

Hal ini tidak hanya mengurangi kehilangan energi selama transmisi, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan terhadap gangguan. International Energy Agency (IEA, 2023) menekankan bahwa penerapan *smart grid* merupakan langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi menuju energi bersih.

Teknologi lain yang juga memberikan dampak signifikan dalam efisiensi pengelolaan SDA adalah *blockchain*. Sistem ini memungkinkan pencatatan dan pelacakan yang transparan terhadap alur distribusi SDA dari hulu ke hilir. Di sektor kehutanan, tambang, dan perikanan, penggunaan *blockchain* membantu mengidentifikasi asal-usul produk dan memastikan bahwa sumbernya legal dan berkelanjutan.



BAB VIII

TANTANGAN GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SDA DAN FINANSIAL

Dampak Perubahan Iklim terhadap SDA dan Ekonomi Kawasan

Perubahan iklim merupakan ancaman multidimensional yang memengaruhi stabilitas ekologi, sosial, dan ekonomi di berbagai belahan dunia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pembangunan ekonomi kawasan. Fenomena ini ditandai oleh kenaikan suhu global, perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan.

Dampak-dampak ini tidak hanya memicu kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi basis utama pembangunan di banyak wilayah, terutama di negara berkembang (Ainurrohmah dan Sudarti, 2022).

Di sektor pertanian, perubahan iklim telah mengubah musim tanam, menurunkan produktivitas lahan, dan meningkatkan risiko gagal panen.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2023) menyebutkan bahwa penurunan produktivitas pertanian mencapai 10—25% di kawasan tropis akibat suhu ekstrem dan kekeringan berkepanjangan.

Ketergantungan masyarakat terhadap pertanian tradisional menjadikan sektor ini sangat rentan, sehingga ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat lokal ikut terancam. Hal ini mendorong meningkatnya angka kemiskinan dan kerentanan sosial-ekonomi di wilayah-wilayah pedesaan (Qomariyah dan Zaelani, 2024).

Sementara itu, sektor kehutanan juga mengalami tekanan berat. Perubahan pola iklim mempercepat degradasi hutan dan menghambat regenerasi vegetasi alami. Ketika frekuensi kebakaran hutan meningkat akibat suhu tinggi dan kekeringan, kapasitas hutan dalam menyerap karbon menurun drastis.

Proses ini bukan hanya memperparah emisi gas rumah kaca, tetapi juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya jasa ekosistem yang vital bagi manusia. Degradasi ini berkontribusi pada krisis ekologis yang lebih luas dan memperlemah daya dukung lingkungan.

Dampak terhadap ekonomi kawasan menjadi semakin terasa seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan adaptasi dan mitigasi. Pemerintah dan pelaku usaha harus mengalokasikan anggaran tambahan untuk membangun infrastruktur tahan iklim, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendukung transformasi sektor-sektor ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Negara-negara berkembang, yang umumnya memiliki ketergantungan tinggi pada SDA dan keterbatasan fiskal, menjadi kelompok paling rentan menghadapi lonjakan biaya ini. Ketimpangan global pun semakin melebar, memperparah ketidakadilan iklim yang sudah ada.

Di kawasan pesisir, perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut dan abrasi, yang mengancam pemukiman, fasilitas pelabuhan, kawasan industri, dan pertanian tambak. Dampak ini semakin diperparah oleh penurunan permukaan tanah (*subsidence*) di kota-kota pesisir besar.

Data dari United Nations Development Programme (UNDP, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 40% populasi dunia hidup di wilayah pesisir, yang berarti jutaan jiwa dan aset ekonomi berada dalam risiko tinggi. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah migran iklim yang berpindah ke daerah-daerah yang dianggap lebih aman, memicu tekanan sosial baru di kawasan tujuan migrasi.

Menghadapi tantangan ini, diperlukan kebijakan dan aksi konkret yang terintegrasi. Strategi mitigasi seperti peningkatan efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, dan reforestasi menjadi penting untuk menurunkan emisi karbon dan memperlambat laju perubahan iklim.

Di sisi lain, adaptasi melalui pembangunan sistem irigasi yang hemat air, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta perlindungan ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove dan pembangunan sabuk hijau harus terus ditingkatkan. Pendekatan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas ilmiah untuk menciptakan sistem ekonomi kawasan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perubahan iklim tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga tantangan struktural dalam pembangunan regional. Menyikapinya membutuhkan transformasi kebijakan, kelembagaan, serta pola pikir pembangunan yang menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama. Tindakan hari ini akan menentukan ketahanan generasi mendatang dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan ekonomi.

Ketimpangan Ekonomi dan Akses Sumber Daya

Ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) merupakan permasalahan global yang masih berlangsung hingga saat ini. Ketimpangan ini tidak hanya tercermin dalam distribusi fisik sumber daya, tetapi juga dalam kapasitas negara dan kelompok sosial untuk mengelola dan memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dan adil.



BAB IX

STUDI KASUS DAN PRAKTIK TERBAIK

Pengelolaan Sumber Daya Tambang dan Manajemen Finansial

Pengelolaan sumber daya tambang dan manajemen finansial merupakan dua aspek krusial dalam industri pertambangan yang saling berkaitan dan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan. Pengelolaan sumber daya tambang mencakup perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan rehabilitasi lingkungan, sementara manajemen finansial melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan untuk memastikan efisiensi, likuiditas, dan profitabilitas. Keduanya harus dijalankan dengan prinsip good governance untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Rahimallah dkk, 2021).

Pengelolaan sumber daya tambang yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Menurut Rahimallah *et al.*, (2021), tata kelola pertambangan yang baik harus memperhatikan prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan penegakan

hukum. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi di daerah tambang.

Studi kasus di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menunjukkan bahwa pengelolaan dana mineral (*mineral fund*) yang tepat dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan *mineral fund* bergantung pada ketersediaan regulasi, program yang tepat sasaran, pengawasan biaya produksi dan hasil produksi tambang, serta adanya badan pengelola multi-pihak. Pemanfaatan dana tersebut sebaiknya difokuskan pada peningkatan sarana kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan (Dharmawan dkk, 2016).

Manajemen finansial yang efektif dalam industri pertambangan melibatkan pengelolaan modal kerja, struktur modal, likuiditas, dan profitabilitas. Zuraidah dan Ghazali (2021) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu, struktur modal dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Dampak perputaran kas, persediaan, dan piutang terhadap profitabilitas perusahaan sektor energi batu bara. Hasilnya menunjukkan bahwa perputaran kas memiliki kontribusi terhadap profitabilitas, sedangkan perputaran persediaan dan piutang tidak memiliki kontribusi signifikan. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan kas yang efisien dalam industri pertambangan.

Studi kasus Norwegia memberikan gambaran konkret tentang bagaimana suatu negara dapat mengelola kekayaan sumber daya alam secara cermat dan berorientasi jangka panjang melalui penerapan mekanisme Sovereign Wealth Fund (SWF). Dalam konteks ini, Norwegia membentuk *Government Pension Fund Global* (GPF), yang didanai dari surplus pendapatan minyak dan gas.

Dana ini tidak digunakan untuk pembiayaan langsung anggaran tahunan, melainkan diinvestasikan dalam portofolio global yang beragam,



BAB X

KOLABORASI MULTI-PIHAK UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN BERKELANJUTAN

Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat

Pembangunan kawasan berkelanjutan pada dasarnya menuntut adanya sinergi yang kuat dan harmonis antara berbagai aktor pembangunan, khususnya pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiganya tidak dapat berjalan secara terpisah atau berdiri sendiri, karena proses keberlanjutan merupakan sistem yang kompleks dan saling berhubungan, yang melibatkan aspek ekologis, ekonomi, sosial, hingga budaya. Tanpa kolaborasi yang terencana dan terstruktur di antara ketiga elemen tersebut, maka upaya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan cenderung bersifat parsial, tidak sistemik, dan pada akhirnya akan gagal dalam menjawab tantangan kerusakan lingkungan serta kesenjangan sosial ekonomi (Purwanto & Ismanto, 2021).

Pemerintah memiliki posisi yang strategis sebagai pengarah kebijakan sekaligus pembuat regulasi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Dalam literatur kebijakan publik, pemerintah diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama (main stakeholder) yang memiliki mandat formal untuk mengatur arah dan mekanisme pembangunan nasional, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA). Fungsi regulatif pemerintah meliputi penetapan undang-undang dan peraturan yang ramah lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyusunan rencana tata ruang yang mempertimbangkan keseimbangan ekologis (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Pemerintah juga dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor swasta melalui penyediaan insentif fiskal maupun nonfiskal untuk proyek-proyek yang mengusung prinsip hijau atau *green development*. Sebagai contoh, penerapan skema pajak karbon dan green financing dapat mendorong para pelaku usaha untuk mengalihkan model bisnis mereka ke arah yang lebih berorientasi lingkungan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas industri agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit lingkungan, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta pemberian sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran.

Dalam konteks ini, fungsi pemerintah tidak hanya terbatas pada kontrol, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antara masyarakat dan pelaku usaha, sehingga terbangun komunikasi dan kepercayaan yang menjadi landasan penting dalam pembangunan partisipatif.

Sektor swasta memegang peranan vital dalam aspek teknis dan pendanaan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi utama mereka terletak pada kemampuan untuk menyediakan modal, inovasi teknologi, serta efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Dalam paradigma baru pembangunan, sektor swasta tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas ekonomi yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga sebagai mitra pembangunan yang bertanggung jawab secara sosial dan ekologis. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi prinsip *Environmental*,



BAB XI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Rangkuman Temuan Utama

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan kawasan berkelanjutan. Keberlanjutan dalam pemanfaatan SDA hanya dapat dicapai melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multi-pihak terbukti menjadi metode yang paling efektif dalam mengelola SDA dengan seimbang, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan meliputi tekanan akibat perubahan iklim, eksploitasi SDA yang tidak terkendali, serta degradasi lingkungan. Penerapan ekonomi hijau memainkan peran krusial dalam mendorong pembangunan kawasan berbasis SDA yang lebih bertanggung jawab. Konsep ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada efisiensi sumber daya, tetapi juga melibatkan penerapan inovasi teknologi, regulasi yang mendukung keberlanjutan,

serta pemberian insentif kepada sektor industri yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular.

Analisis berbagai studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan SDA dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempertahankan keseimbangan ekologi. Penerapan Public-Private Partnership (PPP) dalam proyek-proyek lingkungan terbukti menjadi model yang efektif untuk mempercepat investasi hijau dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta adopsi teknologi hijau menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan SDA di masa depan. Pendekatan yang inklusif, kolaboratif, dan berbasis teknologi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejati.

Rekomendasi untuk Pemerintah, Swasta, dan Akademisi

Berdasarkan temuan yang diperoleh, beberapa rekomendasi utama dapat diberikan kepada berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan pembangunan kawasan berkelanjutan, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah
 - a. Memperkuat regulasi yang mendukung ekonomi hijau, termasuk kebijakan pajak karbon, insentif bagi industri hijau, serta penegakan hukum terhadap eksploitasi SDA yang tidak berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan mekanisme pembiayaan hijau, seperti obligasi hijau (green bonds) dan skema perdagangan karbon, untuk mendorong investasi dalam proyek berkelanjutan.
 - c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA melalui sistem pemantauan berbasis teknologi seperti big data dan Internet of Things (IoT).



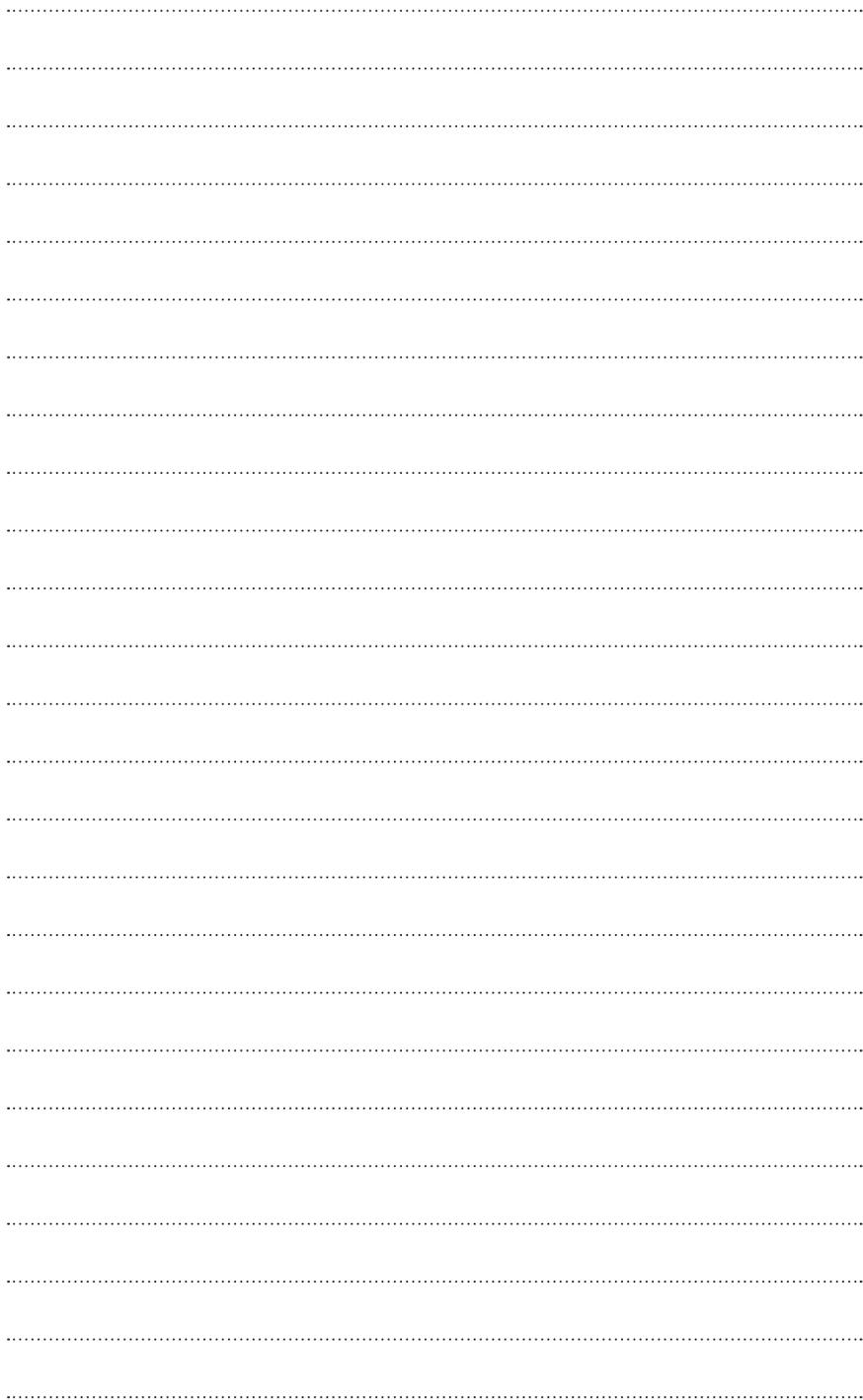
DAFTAR PUSTAKA

- Aghion, P., Hemous, D., & Veugelers, R. 2019. “No Green Growth Without Innovation”. *Economic Policy*, 34(98), 245—303.
- Barbier, E. B. 2019. *The Water Paradox: Overcoming the Global Crisis in Water Management*. Connecticut: Yale University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Provinsi Gorontalo dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. 2021. *Circular Economy Strategy for Indonesia: Boosting Sustainable Economic Growth and Reducing Environmental Impact*. Jakarta: Bappenas.
- Boschini, A. D., Pettersson, J., & Roine, J. 2013. “The Resource Curse and Its Potential Reversal”. *World Development*, 43, 19—41.
- Brundtland Commission. 1987. *Our Common Future*. England: Oxford University Press.
- Corden, W. M., & Neary, J. P. 2019. “Booming Sector and De-industrialisation in a Small Open Economy”. *The Economic Journal*, 92(368), 825—848.
- Daly, H. 1996. *Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development*. Amerika Serikat: Beacon Press.
- Ellen MacArthur Foundation. 2020. “*The Circular Economy: A Wealth of Flows*”. Ellen MacArthur Foundation.
- European Commission. 2023. *European Green Deal: Towards a Climate-Neutral Europe*.

- FAO. 2020. “*The State of the World’s Forests 2020*”. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Flammer, C. 2021. “Corporate Green Bonds”. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 499—516.
- Foley, J. A., et al., 2011. *Solutions for a Cultivated Planet*. *Nature*, 478(7369), 337—342.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. 2015. “ESG and Financial Performance: Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies”. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 210—233.
- Geels, F. W. 2010. “The Multi-Level Perspective on Sustainability Transitions: Responses to Seven Criticisms”. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 1(1), 24—40.
- Geels, F. W., et al., 2016. “The Dynamics of Socio-Technical Transitions: Green Niche Innovations and Sustainability Transitions”. *Research Policy*, 45(8), 896—913.
- Hanley, N., Shogren, J. F., & White, B. 2013. *Introduction to Environmental Economics*. England: Oxford University Press.
- Hartwick, J. M. 2019. *Natural Resources and the Real Economy*. Cambridge University Press.
- Hepburn, C., et al., 2020. “Will COVID-19 Fiscal Recovery Packages Accelerate or Retard Progress on Climate Change?” *Oxford Review of Economic Policy*, 36(S1), S359—S381.
- Hotelling, H. 1931. “The Economics of Exhaustible Resources”. *Journal of Political Economy*, 39(2), 137—175.
- ILO. 2018. *World Employment Social Outlook: Greening with Jobs*. International Labour Organization.
- IPBES. 2021. “*Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*”. Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.
- Jacobs, M. 1991. *The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future*. Pluto Press.

- Joss, S. 2015. “Eco-Cities and Sustainable Urbanism: Analyzing the Green Turn in European Cities”. *Journal of Urban Research*, 14(2), 77—92.
- Kementerian Keuangan RI. 2023. *Green Sukuk Report 2023*. Kementerian Keuangan RI.
- KLHK. 2023. *Laporan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Meckling, J. et al., 2015. “Winning Coalitions for Climate Policy”. *Science*, 349(6253), 1170—1171.
- Ministry of Finance Indonesia. (2019). *Indonesia’s Sovereign Green Sukuk: An Innovative Financing Approach for Green Projects*.
- Newell, P., & Mulvaney, D. 2013. “The Political Economy of the Just Transition”. *The Geographical Journal*, 179(2), 132—140.
- OECD. 2023. *Green Growth Strategy: Towards a Low Carbon Economy*. Paris: OECD Publishing.
- Pearce, D. W., Markandya, A., & Barbier, E. B. 1989. “Blueprint for a Green Economy”. Earthscan.
- Pearce, D., & Turner, R. K. 2018. *Economics of Natural Resources and the Environment*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Raworth, K. 2017. *Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist*. UK: Chelsea Green Publishing.
- Rockström, J., et al., 2009. “Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity”. *Ecology and Society*, 14(2), 32.
- Sachs, J. D., & Warner, A. M. 2021. “Natural Resource Abundance and Economic Growth”. National Bureau of Economic Research.
- Sen, A. 2009. *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Stern, N. 2006. *The Stern Review on the Economics of Climate Change*. Cambridge University Press.
- UNCTAD. (2020). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. United Nations.

- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2020). *Environmental Governance for Sustainable Development*. United Nations Environment Programme.
- UNEP. (2021). *Financing Green Growth: The Role of Financial Institutions in Advancing Sustainable Development*.
- van der Ploeg, F., & Poelhekke, S. (2017). *The Impact of Natural Resources on Economic Growth: A Review of the Empirical Literature*. *Journal of Economic Surveys*, 31(5), 1117-1150.
- Wiser, R., et al. (2017). *Renewable Energy Policies and Markets: The Evolution of Global Renewable Energy Deployment*. *Energy Policy*, 125, 507-520.
- Zenghelis, D. (2021). *The Economic Case for Green Investment and Innovation*. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.
- Zhao, X., et al. (2020). *The Role of Government in the Development of Renewable Energy in China*. *Renewable Energy*, 145, 1235-1248.



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI

No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,
dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



litnus

Anggota IKAPI
No. 340/JTI/2022

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Blok B11 Merjosari,
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT
Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS
Hemat 25%



BERKUALITAS
Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti



Narahubung

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Sumber daya alam (SDA) memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan manusia. Sebagai elemen utama kehidupan, SDA perlu dikelola dengan bijaksana agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemahaman mengenai SDA mencakup berbagai jenis dan potensi yang dimilikinya, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, prinsip dasar manajemen SDA—seperti konservasi, pemanfaatan secara bijak, dan pelestarian—merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam.

Peran ekonomi hijau dalam manajemen SDA sangat krusial. Ekonomi hijau menawarkan pendekatan ramah lingkungan dalam pemanfaatan SDA, dengan mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan ekonomi. Di Indonesia, pengembangan ekonomi hijau didorong oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, integrasi antara SDA dan finansial menjadi sangat penting. Pembiayaan yang tepat dapat mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan mempercepat pembangunan kawasan.

Dalam buku ini membahas materi-materi sebagai berikut.

- Pentingnya Sumber Daya Alam dan Peran Manajemen Finansial untuk Keberlanjutan
- Konsep Dasar Sumber Daya Alam
- Peran Ekonomi Hijau pada Manajemen Sumber Daya Alam
- Strategi Manajemen Sumber Daya Alam
- Integrasi SDA dan Finansial untuk Pembangunan Kawasan
- Pengelolaan Kawasan Berbasis Sumber Daya Alam
- Teknologi dan Inovasi dalam Pengelolaan SDA dan Kawasan
- Tantangan Global dalam Pengelolaan SDA dan Finansial
- Studi Kasus dan Praktik Terbaik
- Kolaborasi Multi-Pihak untuk Pembangunan Kawasan Berkelanjutan
- Kesimpulan dan Rekomendasi

INTEGRASI SUMBER DAYA ALAM *dan* FINANSIAL

DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

litnus. Penerbit



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018
✉ penerbit@litnus@gmail.com
🌐 www.penerbitlitnus.co.id
📄 Literasi Nusantara
📞 literasinusantara_085755971589

Ekonomi

+17

ISBN 978-623-127-396-3



9 786231 127396 3